



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017- 2021

Kumba Digdowiseiso¹, Muh. Alfian²

^{1,2}Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta

History Article

Article history:

Received Feb 8, 2023
Approved Feb 25, 2023

Keywords:

Ratio Analysis,
Financial
Performance, Bima
District

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the regional financial management performance of the Bima Regency Government. This type of research is descriptive research with a quantitative approach. The data analysis technique used is to calculate the ratio of effectiveness, the ratio of regional financial independence, the ratio of the degree of decentralization and the ratio of activity (Direct and Indirect Expenditures). The Effectiveness Ratio of Regional Original Income (PAD) for Bima Regency shows that the implementation of dominant regional taxes and fees is at a low level (below 100%) or ineffective. Based on the calculation of the Regional Financial Independence Ratio for Bima Regency from 2017 to 2021, the relationship pattern from 2017 to 2021 is entirely instructive with very low finances. The Activity Ratio shows that the ratio of indirect spending to total spending is still greater than the ratio of direct spending to total spending. The conclusion from the financial performance analysis of the Bima Regency Government for 2017-2021 has not run optimally as expected.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Teknik analisis data yang digunakan adalah menghitung rasio efektivitas, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi dan rasio aktivitas (Belanja Langsung dan Tidak Langsung). Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima menunjukkan bahwa pelaksanaan pajak dan retribusi daerah dominan berada di tingkat rendah (dibawah 100%) atau tidak efektif. Berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017

sampai dengan tahun 2021, pola hubungan dari 2017 sampai dengan 2021 ialah seluruhnya Instruktif dengan keungan rendah sekali Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Bima tahun 2017-2021 relatif berada di kemampuan Kurang Baik dan Tidak Baik. Rasio Aktivitas menunjukkan bahwa rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja masih lebih besar ketimbang rasio belanja langsung terhadap total belanja, Kesimpulan dari analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017-2021 belum berjalan optimal seperti yang diharapkan.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara dengan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi. Sehingga untuk mengatur akan hal itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur sendiri wilayah setempatnya, karena mengingat kebutuhan suatu daerah berbeda-beda. Hal ini kemudian menjadi acuan Pemerintah Pusat dalam memberlakukan sistem Otonomi (Desentralisaasi) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Hasil revisi atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004), yang dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur kebutuhan masyarakat setempat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi Uundang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disini otonomi daerah telah resmi diberlakukan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang dipatok setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Otonomi daerah berimplikasi pada munculnya kewenangan dan kewajiban daerah untuk melakukan berbagai kegiatan pemerintah lebih mandiri, tidak terlalu banyak dan selalu bergantung pada bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas.

Pada saat otonomi daerah diberlakukan, kemandirain suatu daerah sudah mulai muncul, dimana intervensi pemerintah pusat semakin berkurang, ini bisa kita lihat dengan pemberian wewenang terhadap pemerintah daerah dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kebutuhan rakyat setempat oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kabupaten Bima diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab tersebut agar menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya, yang nanti pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat serta kepada masyarakat Kabupaten Bima itu sendiri. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah ialah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan keuangan serta laporan pertanggung jawaban. Pengelolaan keuangan daerah harus

tertib dan taat terhadap pertauran perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan serta manfaat untuk masyarakat. Suksesnya pelaksanaan otonomi daerah harus ditunjukkan terhadap kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Analisis terhadap keuangan pemerintah daerah kabupaten Bima akan menghasilkan informasi penting, terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya apakah sudah berhasil atau tidak, agar memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Salah satu alat pengukuran yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Bima ialah dengan melakukan analisis rasio efektifitas, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi dan rasio belanja langsung serta belanja tidak langsung terhadap total belanja.

Berbagai kajian tentang kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa ahli, diantaranya, Kumba (2022) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017-2019 dilihat dari RDDF sebesar 17,25% yang masuk kriteria kurang dalam meningkatkan PAD-nya. Pada Derajat Efektivitas PAD adalah sebesar 110,29% dengan kriteria sangat efektif, telah baik dan mampu dalam pengelolaan PAD. Dari sisi REKD adalah sebesar 655,42% dengan kriteria tidak efektif, yakni jumlah angka Belanja Daerah lebih besar dari realisasi PAD. Keserasian Belanja Operasional berada diangka 39,17% berada kurang dari separuhnya dari seluruh Total Belanja Daerah atau kurang dari 50%. Keserasian Belanja Modal adalah sebesar 18,45% yang mencerminkan besarnya alokasi belanja daerah untuk belanja modal masih serasi berada dibawah angka 20%. Pemerintah Kab. Magelang masih memprioritaskan Belanja Operasional jangka pendek tahunan dari APBD nya dibandingkan dengan Belanja Modal untuk pembangunan jangka panjang. Selain itu Pramono (2014) yang melakukan penelitian yang sama yaitu kinerja keuangan daerah menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2010 dan 2011 sudah efektif, efisien, berpengalaman pertumbuhan positif dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Namun tingkat kemandirian Pemerintah Kota Surakarta masih rendah karena pendapatan daerah yang diperoleh dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mariani (2013) juga melakukan penelitian yang sama tentang kinerja keuangan daerah dan kesimpulannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten atau kota di Sumatera Barat sudah efisien meskipun mengalami penurunan setelah terjadi pemekaran daerah, namun tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin meningkat. selain itu penelitiannya Azhar (2010) yang memperoleh hasil kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam sebelum dan sesudah otonomi telah mengalami penurunan atau menuju ke arah yang lebih buruk.

Dilihat dari latar belakang serta penelitian dari beberapa peneliti diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017-2021”.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis melakukan Penelitian pada pemerintah daerah Kabupaten Bima dengan pengambilan data dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima sebagai lembaga pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian ialah penelitian berbentuk deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Eliana (2007) medeskripsikan penelitian deskriptif ialah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek beberapa individu, organisasional, institusi dan atau prespektif lain. Sedangkan sugiyono (2012) mengemukakan penelitian deskriptif ialah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu

variabel, atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

Penelitian kuantitatif sendiri sebagaimana dikemukakan oleh sugiyono (2012) ialah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen riset, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori di atas, penelitian Deskriptif kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian kemudian dianalisis sesuai metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengakuisisi deskripsi kinerja manajemen keuangan pemerintah kabupaten Bima dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah keseluruhan laporan keuangan pemerintah kabupaten Bima. sampel yang digunakan di penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan mempertimbangkan tujuan dan fokus penelitian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah kompilasi produk administrasi data dari perangkat daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bima tahun 2017- 2021 serta data pendukung lainnya yang bersumber dari Kabupaten Bima Dalam Angka yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima. Tahapan selanjutnya adalah analisis data.

Teknik analisis data adalah proses mengolah data yang sudah terkumpul dari responden di lapangan atau referensi lain yang terpercaya. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan suatu analisislah data tersebut bisa diberi arti dan makna yang sangat berguna dalam pemecahan suatu masalah penelitian (Nazir, 2014). Dalam melakukan teknis analisis data, penulis menggunakan beberapa tahap analisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017–2021. Tahap-tahap tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut (Digdowiseiso, 2022; Digdowiseiso & Bachtiar, 2022; Digdowiseiso, K., Murshed, S.M., & Bergh, S.I (2022a; 2022b):

1. Menghitung rasio efektifitas.
2. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah.
3. Menghitung rasio derajat desentralisasi.
4. Menghitung rasio aktivitas (belanja langsung dan belanja tidak langsung).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keuangan Daerah Kabupaten Bima

Salah satu unsur penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang diukur secara rasional dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) disusun sebagai satu kesatuan sistem yang menyeluruh dan disusun berdasarkan potensi dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Bima diupayakan tetap ada dan meningkat setiap tahun.

Pemerintah daerah Kabupaten Bima menetapkan target pencapaian kinerja untuk setiap belanja, baik dari segi konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, serta program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pertanggung-jawaban dan klarifikasi perencanaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek-aspeknya antara lain indikator, tolok ukur dan target kinerja.

Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Bima lima tahun terakhir (2017-2021) dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima, Tahun 2017- 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Daerah	120,447,64 4,671	195,312,16 8,175	139,520,63 1,473	153,601,808, 793	154,093,206 ,361.00
Pendapatan Asli Daerah	188,203,81 4,216	120,342,97 2,757	135,874,14 1,561	131,585,549, 042.49	141,708,257 ,766
Hasil Pajak Daerah	12,750,626, 765	14,852,363, 146	16,084,288, 190	13,861,845,5 67.00	13,778,957, 369
Hasil Retribusi Daerah	16,144,271, 138	13,292,909, 504	21,676,155, 573	18,640,585,2 62.00	18,134,336, 488
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5,032,680,2 50	4,358,917,4 83	4,743,194,2 45	6,002,248,59 7.07	5,049,293,4 16
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	154,276,23 6,063	87,838,782, 624	93,370,503, 553	93,080,869,6 16.42	104,745,670 ,493
Dana Perimbangan	1,269,755,5 14,037	1,329,968,1 27,945	1,348,821,9 46,185	1,254,603,99 5,069.00	1,552,209,8 54,985
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	61,764,579, 062	37,049,193, 015	32,950,057, 637	38,117,847,0 00.00	68,643,899, 467
Dana Alokasi Umum	879,315,32 6,000	876,388,64 1,503	909,112,35 8,000	832,124,683, 000.00	860,233,662 ,000
Dana Alokasi Khusus	328,675,60 8,975	416,530,29 3,427	406,759,53 0,548	384,361,465, 069.00	1,800,000,0 00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	228,911,92 5,290	292,924,60 7,436	327,667,70 3,559	357,853,249, 790.00	81,907,013, 633
Pendapatan Hibah	20,809,046, 336	65,847,611 ,987	76,367,839 ,900	70,259,197,3 00.00	12,859,543, 633
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Belanja Daerah	1,662,901,9 47,395	1,817,928, 3 13,612	1,822,894, 5 20,191	1,753,949,55 1,009.19	1,757,036,6 61,722
Belanja Tidak Langsung	1,153,089,9 22,214	973,843,71 4,975	1,224,465, 6 02,736	1,137,160,11 2,718.04	1,178,724,8 18,835
Belanja Pegawai	791,780,79 2,722	692,387,22 0,646	808,638,50 5,617	673,611,621, 053.00	746,772,807 ,523
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	106,165,11 6,399	26,432,343 ,700	127,279,97 1,487	155,987,981, 638.00	31,715,077, 500
Belanja Bantuan Sosial	1,879,445,0 00	679,500,00 0	700,400,00 0	638,200,000. 00	6,764,331,3 50
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	3,733,271,3 79	1,914,531, 1 64	2,484,994, 9 84	3,457,800,45 2.00	3,318,427,2 72
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/	248,079,66 5,065	251,203,14 9,465	283,328,23 0,648	285,531,171, 949.04	285,553,117 ,426

Kabupaten/Kota

Belanja Tak Terduga	1,451,631,650	1,226,970,000	2,033,500,000	17,933,337,626.00	27,864,429,306
Belanja Langsung	509,812,025,181	844,084,598,637	598,428,917,456	616,789,438,291.15	261,575,868,883
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	218,227,425,363	447,429,144,605	282,294,594,687	226,551,786,121.30	27,864,429,306
Belanja Modal	291,584,599,818	396,655,454,032	316,134,322,769	256,022,945,964.00	261,575,868,883

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan

Dilihat dari tabel di atas jelas bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah di tahun 2017-2021 mengalami gejolak naik turun.

2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima

Cara mengukur Rasio Efektifitas PAD dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100$$

Untuk melihat rasio efektifitas keuangan daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2. Efektifitas Keuangan Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Efektif	X > 100
Efektif Berimbang	X = 100
Tidak Efektif	X < 100

Sumber : Halim, 2007

Hasil perhitungan rasio efektifitas PAD pemerintah Kabupaten Bima dari tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Bima Tahun 2014 – 2018

Tahun	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektifitas PAD	Kriteria
2017	120,447,644,671	188,203,814,216	156.25 %	Efektif
2018	195,312,168,175	120,342,972,757	61.62 %	Tidak Efektif
2019	139,520,631,473	135,874,141,561	97.39 %	Tidak Efektif
2020	153,601,808,793	131,585,549,042.49	85.67 %	Tidak Efektif
2021	154,093,206,361.00	141,708,257,766	91.96 %	Tidak Efektif

Sumber : Hasil Olah Data Primer

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima

Adapun cara perhitungan Rasio Kemandirian adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RK = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pinjaman}} \times 100$$

Sedangkan untuk mengukur pola hubungan dan tingkat kemandirian serta kemampuan keuangan daerah akan diukur melalui tabel skala interval keuangan daerah di bawah ini :

Tabel 4. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian Keungan Daerah (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Halim (2007)

Adapun Rasio Kemandirian Keungan Daerah Kabupaten Bima 2017-2021 termuat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5. Rasio Kemandirian Keungan Daerah Kabupaten Bima 2017-2021

Tahun	PAD Jumlah	Total Transfer Jumlah	Rasio KK (%)
2017	188,203,814,216	1,498,667,439,327	12.56 %
2018	120,342,972,757	1,622,892,735,381	7.42 %
2019	135,874,141,561	1,676,489,649,744	8.10 %
2020	131,585,549,042.49	1,612,457,244,859	8.16 %
2021	141,708,257,766	1,634,116,868,618	8.67 %

Sumber : Hasil Olah Data Primer

Dilihat dari tabel diatas bahwa Rasio Kemandirain Keuangan Daerah Kabupaten Bima dapat disimpulkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima 2017-2021 Menurut Skala Interval

Tahun	Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian Keungan Daerah (%)	Pola Hubungan
2017	Rendah Sekali	12.56 (%)	Instruktif
2018	Rendah Sekali	7.42 (%)	Instruktif
2019	Rendah Sekali	8.10 (%)	Instruktif
2020	Rendah Sekali	8.16 (%)	Instruktif
2021	Rendah Sekali	8.67 (%)	Instruktif

Sumber : Halim, (2007)

4. Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Bima

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap Penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyelenggaraan desentralisasi (Halim, 2007). Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi daerah ialah seperti tabel berikut :

Tabel 7. Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah

Kemampuan Desentralisasi	Rasio Derajat Desentralisasi (%)
Sangat Baik	>50
Baik	25-50
Kurang Baik	10-25
Tidak Baik	<10

Sumber : (Halim, 2007)

Rumus perhitungan Derajat Desentralisasi :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Adapun Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Bima tahun 2017-2021 ialah ditinjau dari tabel berikut :

Tabel 8. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Bima Tahun 2017- 2021

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (%)
	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
2017	188,203,814,216	1,686,871,253,543	11.16 %
2018	120,342,972,757	1,743,235,708,137	6.90 %
2019	135,874,141,561	1,812,363,791,305	7.50 %
2020	131,585,549,042.49	1,744,042,793,901.49	7.54 %
2021	141,708,257,766	1,775,825,126,384	7.98 %

Sumber : Hasil Olah Data Primer

5. Rasio Aktivitas Keuangan Kabupaten Bima

Berikut Rumus Perhitungan Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja dan Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja :
Rumus Perhitungan Rasio Belanja Langsung (RBL).

$$RBL = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Rumus Belanja Tidak Langsung (RBTL).

$$RBTL = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Adapun Perhitungan Aktivitas Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Kabupaten Bima 2017-2021 tercantum di dalam tabel dibawah ini :

Tabel 9. Aktivitas Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Kabupaten Bima 2017-2021

Tahun	Total BelanjaLangsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja (%)
2017	509,812,025,181	1,662,901,947,395	30.66 %
2018	844,084,598,637	1,817,928,313,612	46.43 %
2019	598,428,917,456	1,822,894,520,191	32.83 %
2020	616,789,438,291.15	1,753,949,551,009.19	35.17 %
2021	261,575,868,883	1,757,036,661,722	14.89 %

Sumber : Hasil Olah Data Primer

Sedangkan Perhitungan Aktivitas Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Kabupaten Bima 2017-2021 tercantum di dalam tabel dibawah ini :

Tabel 10. Aktivitas Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Kabupaten Bima 2017-2021

Tahun	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja (%)
2017	1,153,089,922,214	1,662,901,947,395	69.34 %
2018	973,843,714,975	1,817,928,313,612	53.57 %
2019	1,224,465,602,736	1,822,894,520,191	67.17 %
2020	1,137,160,112,718.04	1,753,949,551,009.19	64.83 %
2021	1,178,724,818,835	1,757,036,661,722	67.09 %

Sumber : Hasil Olah Data Primer

Berikut penulis menampilkan Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Kabupaten Bima 2017-2021.

Tabel 11. Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bima 2017-2021

Tahun	Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja (%)	Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja (%)
2017	30.66 %	69.34 %
2018	46.43 %	53.57 %
2019	32.83 %	67.17 %
2020	35.17 %	64.83 %
2021	14.89 %	67.09 %

Sumber : Hasil Olah Data Primer

B. Pembahasan

1. Gambaran Umum Kabupaten Bima

a. Letak

Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah otonom di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Terletak di ujung timur pulau Sumbawa, bersebelahan dengan Kota Bima.

b. Topografis

Wilayah Kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan daratan tinggi bertekstur pegunungan sementara sisanya (30%) adalah daratan. Sekitar 14% dari Proporsi daratan rendah tersebut merupakan area persawahan dan lebih dari separuh lahan kering.

Kabupaten Bima terletak di bagian timur pulau sumbawa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Timur : Laut Sape
- Sebelah Barat : Kabupaten Domp

c. Luas wilayah

Setelah pembentukan Daerah Kota Bima berdasarkan Undang undang Nomor 13 tahun 2002 adalah seluas 437.465 Ha atau 4.394,38 Km² (sebelum pemekaran 459.690 Ha atau 4.596,90 Km²) dengan jumlah penduduk 419.302 jiwa dengan kepadatan rata-rata 96 jiwa/Km².

2. Analisis Hasil Penelitian

a. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima berdasarkan penelitian dan perhitungan yang tercantum pada tabel 3 (dua) , menunjukkan bahwa pelaksanaan pajak dan retribusi daerah dominan berada di tingkat rendah (dibawah 100%) atau tidak efektif. Di tahun 2017 memang menunjukkan rasio efektifitas sangat efektif dengan nilai (persen) menunjukkan 156.25%. Namun pada tahun 2018 sampai 2021 menunjukkan rasio efektifitas yang tidak efektif dengan nilai (persen) rata-rata dibawah 100% (seartus persen). Tahun 2018 menunjukkan nilai 61.62%, tahun 2019 menunjukkan nilai 97.39%, tahun 2020 menunjukan nilai 85.67% dan tahun 2021 menunjukkan nilai 91.96%. ini menunjukkan bahwa rasio efektifitas PAD kabupaten Bima dominan tidak efektif.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, pola hubungan dari 2017 sampai dengan 2021 ialah seluruhnya Instrukturif. Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima seperti yang tercantum pada tabel 5 (lima) dan 6 (enam) ialah kurang dari 25%, tahun 2017 rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bima menunjukkan 12.56% sedangkan tahun 2018 menunjukkan 7.42%, sangat rendah ketimbang tahun sebelum dan sesudahnya, yang dimana pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan angka (persen) rata-rata 8%. Tahun 2019 menunjukkan 8.10%, tahun 2020 menunjukkan 8.16% dan tahun 2021 menunjukan 8.67%. Ini menunjukkan bahwa, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bima dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 rendah sekali.

Pola hubungan Instukturif sendiri ialah pola hubungan yang dimana peranan pemerintah pusat lebih dominana ketimbang kemandirian pemerintah daerah.

c. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarakan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah. Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Bima tahun 2017-2021 relatif berada di kemampuan Kurang Baik dan Tidak Baik. Seperti yang telah di olah pada tabel 8 (delapan). Pada tahun 2017 rasio

desentralisasi kabupaten Bima berada diangka (persen) 11.16% yang menunjukkan kemampuan desentralisasi kurang baik. Dan di tahun selanjutnya ialah tahun 2018 berada di angka (persen) 6.90% yang menunjukkan kemampuan desentralisasi Tidak Baik. Hal senada juga terjadi di tahun 2019 sampai tahun 2021 yang menunjukkan angka (persen) rata-rata 7% (tujuh persen), dimana ini menunjukkan bahwa kemampuan desentralisasi kabupaten Bima dominan Tidak Baik.

d. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dilihat pada tabel 11 (sebelas) menunjukkan bahwa rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja masih lebih besar ketimbang rasio belanja langsung terhadap total belanja, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bima masih memprioritaskan anggaran dalam belanja tidak langsung.

KESIMPULAN

Dilihat dari hasil analisis dan pembahasan diatas, bahwa pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dalam rasio efektifitas yang efektif hanya terjadi pada tahun 2017, dan tahun selanjutnya 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan rasio efektifitas tidak efektif. Sementara itu, rasio kemandirain keungan daerah Kabupaten Bima tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan pola hubungan yang instruktif. Ini menandakan bahwa, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bima tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dalam hal kemampuan keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan yang rendah sekali. Selanjutnya rasio derajat desentralisasi pemerintah daerah Kabupaten Bima dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kemampuan desentralisasi Kurang Baik dan Tidak Baik. Dan yang terakhir rasio aktivitas belanja langsung dan rasio aktivitas beanja tidak langsung pemerintah daerah Kabupaten Bima menunjukkan bahwa, pemerintah Kabupaten Bima masih memprioritaskan Belanja Tidak Langsung ketimbang Belanja Langsung.

Dari uraian tersebut diatas. Bisa disimpulkan kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bima dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 belum berjalan dengan optimal seperti yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran, T., & Pandawa, J. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. 1(1), 40–54.
- Budianto, A. (2020). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. 32.
- Digdowiseiso, K. (2022). Is Fiscal Decentralization Growth Enhancing? *Economies*, 10(3), 62.
- Digdowiseiso, K., & Satrio, M.B. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Ketergatangan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(Special Issue 3), 1170-1181.
- Digdowiseiso, K., Murshed, S.M., & Bergh, S.I. (2022). How Effective is Fiscal Decentralization for Inequality Reduction in Developing Countries? *Sustainability*, 14(1), 505.
- Digdowiseiso, K., Murshed, S.M., & Bergh, S.I. (2022). What Drives Regional Proliferation in Indonesia? Assessing the Role of Institutions. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 20(1).

- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 785–787.
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Mataris, H., & Digdowiseiso, K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. In *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 7, Issue 1).
<https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i1.1049>
- Rr. Suprantinegrum, S. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2009-2013). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 30(1), 30–40.
- Surastowo. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Simplex*, 2(3), 175–185.